

Asesmen Transmisi Suku Bunga Kebijakan Kepada Suku Bunga Dasar Kredit Perbankan Januari 2026



BANK INDONESIA

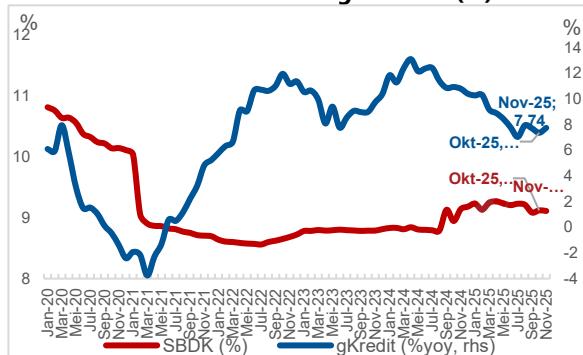
SBDK November 2025 kembali turun seiring dengan berlanjutnya penurunan biaya dana di tengah kenaikan biaya overhead.

- **SBDK November 2025 menurun secara bulanan didorong oleh berlanjutnya penurunan biaya dana akibat membaiknya likuiditas dan meredanya persaingan dana antarbank.**
- **Suku bunga kredit agregat menurun pada November 2025, didukung oleh penurunan suku bunga kredit baru. Perkembangan ini mengindikasikan menguatnya proses transmisi suku bunga kebijakan ke suku bunga kredit pada Semester II 2025.**
- **Suku bunga kredit pada mayoritas sektor prioritas KLM menurun dalam 6 bulan terakhir sehingga mendukung prospek penyaluran kredit yang lebih optimal.**

Perkembangan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK)¹ November 2025

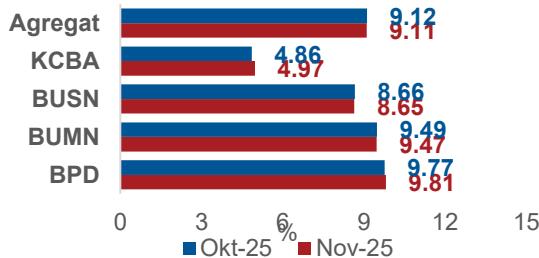
SBDK November 2025 menurun secara bulanan, didukung oleh penurunan biaya dana akibat meredanya persaingan pendanaan antarbank. SBDK tercatat turun sebesar 1 basis points (bps) secara bulanan menjadi sebesar 9,11% pada November 2025. Penurunan SBDK turut mendorong kinerja pertumbuhan kredit perbankan yang meningkat menjadi 7,74% pada November 2025 (**Grafik 1**).² Berdasarkan kelompok bank, penurunan SBDK terutama dikontribusikan oleh kelompok BUMN dan BUSN yang masing-masing mencatatkan penurunan sebesar 2 bps dan 1 bps menjadi 9,47% dan 8,65% (**Grafik 2**). Sementara itu, SBDK pada kelompok KCBA dan BPD masing-masing meningkat sebesar 11 bps dan 4 bps menjadi 4,97% dan 9,81%. Perkembangan ini dipengaruhi membaiknya kondisi likuiditas yang mendorong penurunan biaya dana dan diharapkan semakin memperkuat transmisi penurunan suku bunga kebijakan ke suku bunga dasar kredit ke depan.

Grafik 1. Perkembangan SBDK (%)



Grafik 2. SBDK November 2025*

Berdasarkan Kelompok Bank (%)



*Berdasarkan ketentuan baru dengan penyesuaian revisi bank

Sumber: OJK (diolah)

*Berdasarkan ketentuan baru dengan penyesuaian revisi bank

Sumber: OJK (diolah)

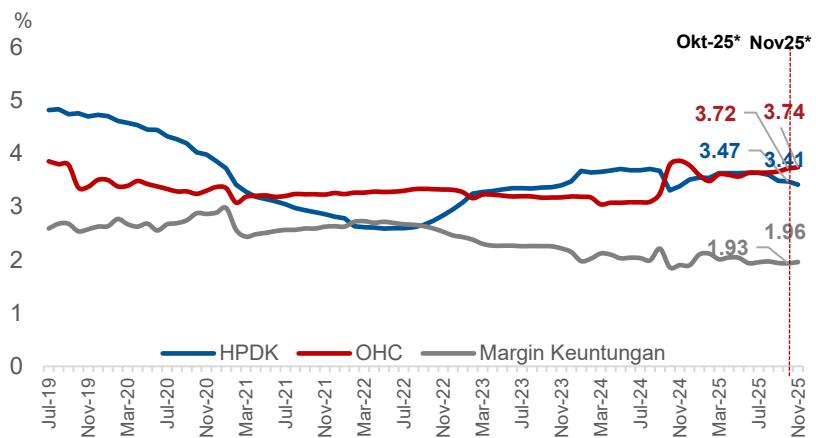
¹ SBDK merupakan suku bunga dasar kredit yang dipublikasikan oleh bank sesuai dengan Peraturan OJK No. 13 Tahun 2024 tentang Transparansi dan Publikasi Suku Bunga Kredit. SBDK digunakan sebagai dasar penetapan suku bunga kredit yang akan dikenakan pada nasabah, namun belum mencakup premi risiko yang dapat bervariasi untuk tiap debitur. Dengan demikian, besarnya suku bunga kredit yang dikenakan kepada debitur secara umum tidak sama dengan SBDK. Periode asesmen menggunakan data SBDK yang tersedia hingga publikasi laporan.

² Sejak Oktober 2024, komponen pembentuk SBDK mengalami perubahan dan penyesuaian, sejalan dengan pengaturan dalam POJK No. 13 Tahun 2024 tentang Transparansi dan Publikasi Suku Bunga Dasar Kredit. Lebih lanjut, angka SBDK Oktober 2024, November 2024 dan Desember 2024 disajikan ulang sejalan dengan koreksi data yang disampaikan bank pelapor pada periode dimaksud.

Perkembangan Komponen SBDK³

Penurunan SBDK didukung oleh berlanjutnya penurunan biaya dana (HPDK) yang membuka ruang bagi perbaikan margin keuntungan, di tengah kenaikan biaya overhead (OHC). Biaya dana atau Harga Pokok Dana Untuk Kredit (HPDK) yang kembali menurun sebesar 6 bps secara bulanan menjadi 3,41% pada November 2025 (**Grafik 3**), mencerminkan meredanya tekanan pendanaan seiring dengan membaiknya kondisi likuiditas perbankan. Di sisi lain, biaya *overhead* (*Overhead Cost* atau OHC) meningkat terbatas sebesar 2 bps menjadi 3,74%, dipengaruhi kenaikan biaya tenaga kerja dan upaya penguatan pengawasan kualitas kredit. Akibatnya, bank mampu menurunkan SBDK meskipun margin keuntungan membaik sebesar 3 bps menjadi 1,96%.

Grafik 33. Perkembangan Komponen Pembentuk SBDK* (%)



*Berdasarkan ketentuan baru dengan penyesuaian revisi bank.

Sumber: OJK (diolah)

Membaiknya kondisi likuiditas berkontribusi pada penurunan HPDK pada November 2025, terutama pada kelompok BUMN dan BUSN. Penurunan HPDK pada November 2025 mencerminkan berlanjutnya dampak tunda dari transmisi penurunan suku bunga kebijakan Bank Indonesia sebesar 125 bps sepanjang tahun 2025. Penurunan HPDK terjadi pada mayoritas kelompok bank dengan kontributor utama pada kelompok BUMN dan BUSN yang mencatatkan level HPDK terendah sepanjang tahun 2025 sebesar 3,24% dan 3,45%, atau turun sebesar 7 bps dan 5 bps secara bulanan (**Grafik 4**). Pada kelompok BPD, HPDK menurun sebesar 4 bps menjadi 4,37%. Sementara itu, HPDK pada kelompok KCBA tercatat stabil pada level 1,66%. Dinamika pada kelompok BUMN dipengaruhi oleh penempatan dana Pemerintah sebesar Rp276 Triliun (hingga November 2025) yang berdampak positif dalam meredakan persaingan dana antarbank. Kondisi ini tecermin pada penurunan suku bunga deposito dengan imbal hasil yang tinggi (*special rate*), terutama pada golongan Pemerintah. Kelompok BUSN juga merespon penyesuaian kelompok BUMN dengan memperbaiki struktur pendanaan melalui penurunan suku bunga deposito, kendati dalam besaran yang lebih terbatas.

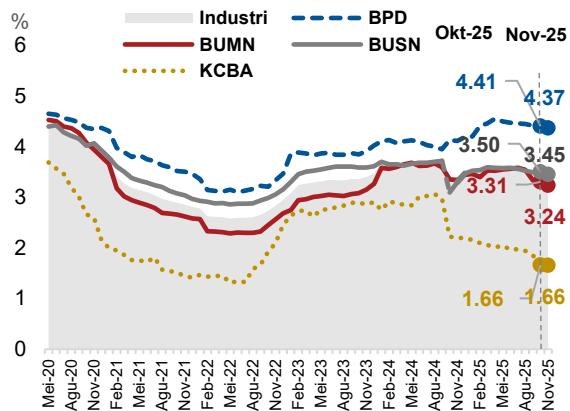
³ SBDK terdiri dari 3 (tiga) komponen pembentuk, yaitu (i) Harga Pokok Dana untuk Kredit (HPDK) yang terdiri dari DPK (Biaya DPK, biaya giro wajib minimum, biaya premi LPS) dan Biaya non-DPK (Biaya dana liabilitas kepada Bank Indonesia dan bank lain, Biaya surat-surat berharga yang diterbitkan, Biaya dana pinjaman yang diterima, dan lainnya); (ii) Biaya overhead (OHC) yang terdiri dari Perubahan nilai wajar liabilitas, Kerugian risiko operasional, Komisi/provisi/fee dan administrasi, Penyusutan/amortisasi, kerugian penurunan nilai aset non-keuangan, Beban tenaga kerja, Beban promosi, Kerugian penjabaran tansaksi valas, Beban lainnya, Biaya overhead lainnya; (iii) Margin keuntungan, yang ditetapkan oleh bank dalam penyaluran kredit.

Penurunan biaya dana pada kelompok BPD, dikontribusikan oleh peningkatan dana Pemerintah dan Korporasi Swasta, seiring dengan realisasi anggaran belanja daerah menjelang berakhirnya tahun anggaran. Sementara itu, HPDK pada kelompok KCBA relatif stabil dikontribusikan oleh struktur pendanaan murah yang didominasi oleh giro dengan pangsa sebesar 77,56% pada November 2025. Ke depan, berlanjutnya penurunan biaya dana diharapkan memperkuat insentif bagi bank untuk menurunkan suku bunga kredit agar mendukung permintaan kredit dan prospek intermediasi.

Pada November 2025, biaya OHC tercatat meningkat pada seluruh kelompok bank, namun dengan besaran yang relatif terbatas. OHC meningkat sebesar 2 bps secara bulanan menjadi 3,74%, dengan kontribusi kenaikan terbesar berasal dari kelompok KCBA yang mencatatkan kenaikan sebesar 18 bps menjadi 1,76%. Sementara itu, kenaikan OHC pada kelompok BPD, BUMN dan BUSN tercatat lebih moderat, masing-masing sebesar 6 bps, 2 bps, dan 1 bps menjadi 3,67%, 4,23%, dan 3,23% (**Grafik 5**). Secara umum, kenaikan OHC didorong oleh peningkatan belanja barang dan jasa dalam rangka penguatan pengawasan dan pengelolaan kualitas kredit, yang mencerminkan langkah kehati-hatian perbankan di tengah perkembangan risiko kredit. Pada kelompok KCBA, kenaikan OHC terutama berasal dari kenaikan biaya lainnya sebesar 18 bps menjadi 0,77%, sejalan dengan upaya bank dalam mempertahankan basis deposit melalui strategi retensi dana. Kondisi ini sejalan dengan penawaran imbal hasil simpanan yang relatif lebih rendah dibandingkan kelompok lainnya. Adapun pada kelompok BPD, kenaikan biaya *overhead* terutama dipengaruhi oleh kenaikan biaya tenaga kerja, seiring dengan upaya peningkatan kualitas kredit menjelang akhir tahun, terutama untuk pekerjaan yang bersumber dana dari anggaran pemerintah.

Margin keuntungan tercatat meningkat pada mayoritas kelompok bank. Kelompok BUMN mencatatkan kenaikan margin keuntungan terbesar sebesar 3 bps menjadi 2,01% (**Grafik 6**). Kenaikan ini didukung oleh penurunan biaya dana akibat perbaikan struktur dana. Kenaikan margin keuntungan juga terjadi pada kelompok BUSN dan BPD, masing-masing sebesar 2 bps menjadi 1,96% dan 1,77%. Perkembangan ini menunjukkan upaya bank untuk memperbaiki kinerja profitabilitas melalui perbaikan margin suku bunga, namun tetap terjaga tingkat suku bunga kredit yang kompetitif. Di sisi lain, margin keuntungan pada kelompok KCBA tercatat menurun secara bulanan sebesar 6 bps menjadi 1,55%, terutama dipengaruhi oleh kenaikan biaya *overhead* yang cukup signifikan. Perbedaan perkembangan margin keuntungan antar kelompok bank mencerminkan perbedaan strategi bisnis, struktur pendanaan, dan karakteristik basis nasabah masing-masing bank dalam merespon dinamika biaya dan risiko.

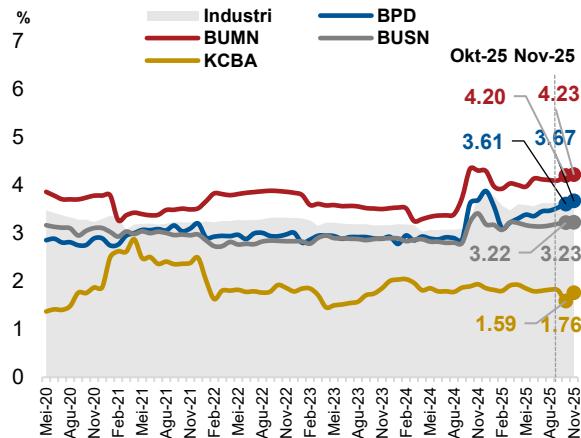
Grafik 44. Perkembangan HPDK* Berdasarkan Kelompok Bank (%)



*Berdasarkan ketentuan baru dengan penyesuaian revisi bank.

Sumber: OJK (diolah)

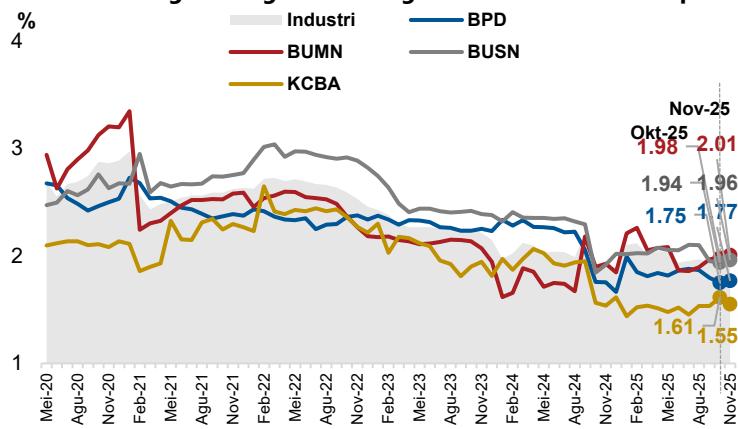
Grafik 55. Perkembangan OHC* Berdasarkan Kelompok Bank (%)



*Berdasarkan ketentuan baru dengan penyesuaian revisi bank.

Sumber: OJK (diolah)

Grafik 66. Perkembangan Margin Keuntungan* Berdasarkan Kelompok Bank (%)



*Berdasarkan ketentuan baru dengan penyesuaian revisi bank.

Sumber: OJK (diolah)

Perkembangan Suku Bunga Kredit

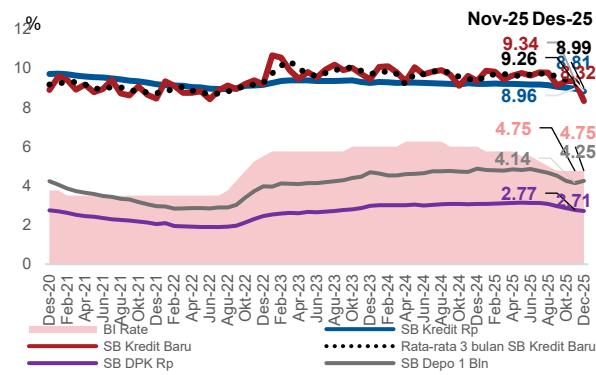
Suku bunga kredit Rupiah mengalami penurunan secara bulanan, ditopang penurunan suku bunga kredit baru.⁴ Pada Desember 2025, rata-rata tertimbang suku bunga kredit Rupiah tercatat turun 15 bps secara bulanan menjadi 8,81%. Penurunan ini didukung oleh penurunan signifikan atas suku bunga kredit baru sebesar 102 bps secara bulanan menjadi 8,32% (**Grafik 7**). Penurunan suku bunga kredit baru mengindikasikan efektivitas transmisi suku bunga kebijakan di pasar kredit, sejalan dengan dampak tunda dari penurunan BI Rate sebesar 125 bps sepanjang tahun 2025. Respons penurunan suku bunga kredit baru terjadi pada seluruh kelompok bank, dengan penurunan paling dalam pada kelompok BPD dan

⁴ Suku bunga kredit baru adalah tingkat harga yang ditetapkan bank selaku kreditur atas fasilitas kredit baru kepada debitur.

BUSN, masing-masing sebesar 135 bps dan 108 bps menjadi 8,09% dan 9,38%. Sementara itu, kelompok BUMN dan KCBA mencatatkan penurunan masing-masing sebesar 93 bps dan 62 bps menjadi 7,22% dan 6,82%. Secara umum, penurunan suku bunga kredit baru dipengaruhi kenaikan pencairan kredit investasi kepada golongan debitur Pemerintah maupun IKNB Swasta dengan suku bunga yang lebih rendah (**Grafik 8**). Dinamika ini mengindikasikan bahwa pergerakan suku bunga kredit baru bersifat sensitif terhadap perubahan biaya dana, namun dalam jangka pendek tetap dipengaruhi oleh komposisi pencairan kredit pada periode berjalan.

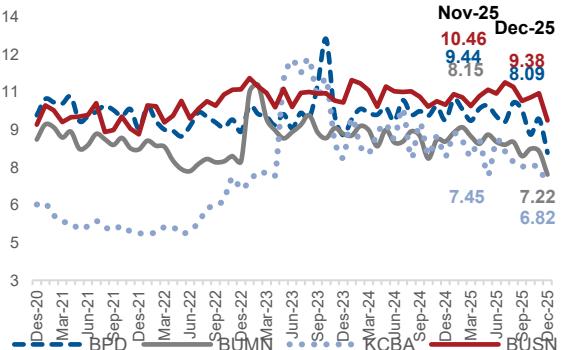
Dari sisi penghimpunan dana, perbaikan kondisi likuiditas perbankan mendorong berlanjutnya penurunan biaya dana. Suku bunga Dana Pihak Ketiga (DPK) Rupiah pada Desember 2025 kembali turun sebesar 6 bps secara bulanan menjadi 2,71%, melanjutkan tren penurunan sejak Juli 2025 (**Grafik 7**). Penurunan ini mencerminkan dampak tunda dari pelonggaran kebijakan moneter Bank Indonesia melalui penurunan suku bunga kebijakan sebesar 125 bps sepanjang tahun 2025, serta diperkuat oleh strategi operasi moneter ekspansif untuk menjaga kecukupan likuiditas. Selain itu, penempatan dana Pemerintah di perbankan turut memberikan dampak positif terhadap perbaikan kondisi likuiditas dan meredakan persaingan dana berbiaya tinggi antarbank. Ke depan, prospek penurunan suku bunga dana dan suku bunga kredit diprakirakan berlanjut, sejalan dengan ekspektasi penurunan suku bunga global, pelonggaran kebijakan moneter domestik, serta kebijakan fiskal ekspansif.

Grafik 77. Perkembangan Suku Bunga Kredit Rp dan Suku Bunga DPK Rp (%)



Sumber: LBUT Antasena (diolah)

Grafik 88. Perkembangan Suku Bunga Kredit Baru Berdasarkan Kelompok Bank (%)

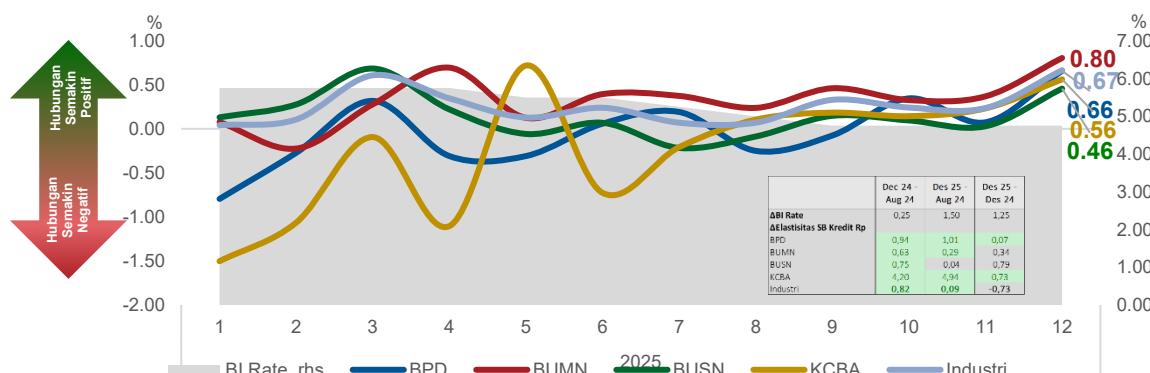


Sumber: LBUT Antasena (diolah)

Perkembangan Elastisitas Suku Bunga Kredit Baru Sejak Agustus 2024

Elastisitas suku bunga kredit baru terhadap suku bunga kebijakan menunjukkan perbaikan pada Semester II tahun 2025. Transmisi suku bunga kebijakan kepada suku bunga kredit baru terindikasi semakin membaik sejak Juli 2025, sebagaimana ditunjukkan oleh konvergensi elastisitas pada seluruh kelompok bank. Merespon penurunan suku bunga kebijakan sejak Agustus 2024, penyesuaian suku bunga kredit baru oleh perbankan menunjukkan konsistensi yang semakin kuat, tecermin dari hubungan elastisitas yang searah serta kenaikan angka elastisitas di level industri perbankan dari 0,04 pada awal 2025 menjadi sebesar 0,67 pada Desember 2025 (**Grafik 9**). Meskipun demikian, kecepatan dan besaran respons penyesuaian suku bunga kredit baru masih bervariasi antar kelompok bank. Pada kelompok BUMN dan BPD, suku bunga kredit baru bergerak relatif sejalan dan persisten dengan pergerakan suku bunga kebijakan. Sementara itu, transmisi penurunan suku bunga pada kelompok BUSN dan KCBA cenderung lebih lambat. Pergerakan suku bunga kredit pada kelompok BUSN dan KCBA yang tidak secepat kelompok BUMN dan BPD dipengaruhi oleh komposisi dan pencairan kredit baru yang masih terkonsentrasi pada segmen Kredit Modal Kerja. Pada BUSN, terbatasnya penurunan suku bunga pada segmen Kredit Modal Kerja disebabkan kenaikan suku bunga pada segmen UMKM akibat penurunan kualitas kredit. Sementara itu, suku bunga kredit baru pada KCBA untuk segmen Kredit Modal Kerja merupakan yang terendah di industri sehingga ruang penyesuaian lebih lanjut menjadi lebih terbatas. Namun demikian, tren suku bunga kredit baru pada kelompok KCBA mulai menunjukkan pola yang lebih sejalan dengan suku bunga kebijakan sejak November 2025. Hal ini mencerminkan peningkatan respons dan perbaikan efektivitas transmisi dibandingkan Semester I tahun 2025.

Grafik 99. Elastisitas Suku Bunga Kredit Baru Rupiah Berdasarkan Kelompok Bank (%)



Keterangan:

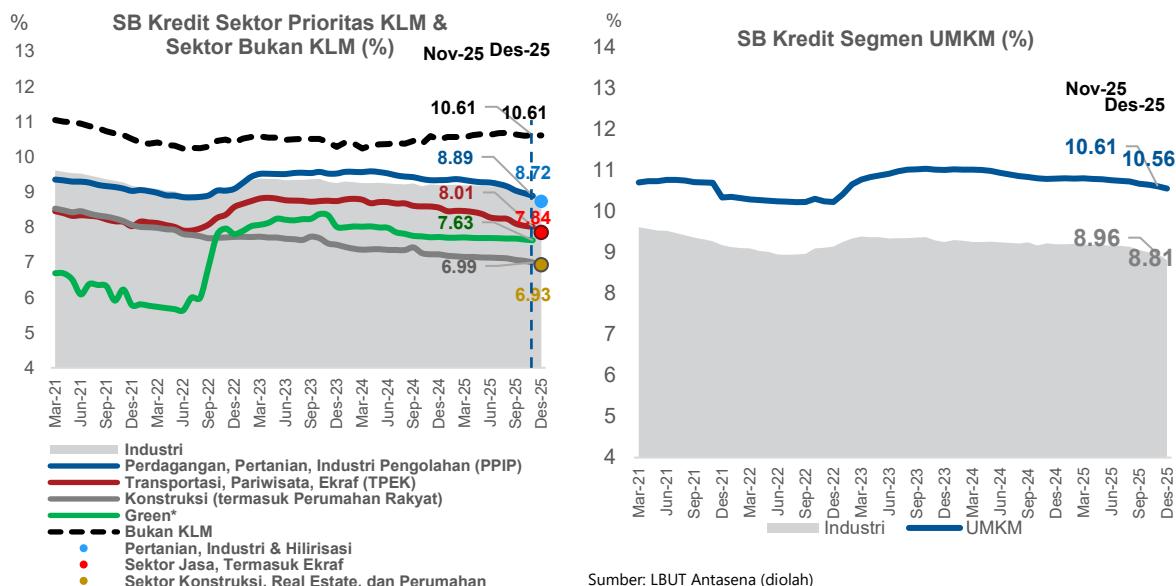
- Elastisitas dihitung dengan rumus sebagai berikut = (% Perubahan SB Kredit Baru Rp) / (% Perubahan BI Rate)
- Periode dasar yang dipakai saat menghitung elastisitas adalah Agustus 2024, yakni awal periode penurunan BI Rate.

Sumber: LBUT Antasena (diolah)

Suku Bunga Kredit Sektor Prioritas Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM)⁵

Penguatan skema pemberian insentif yang berbasis kinerja dan orientasi ke depan (KLM Forward Looking) berkontribusi pada penetapan suku bunga kredit sektor prioritas yang lebih kompetitif. Kondisi ini mengindikasikan efektivitas transmisi penurunan suku bunga kebijakan terhadap suku bunga kredit untuk sektor prioritas KLM, sejalan dengan persepsi risiko perbankan yang tetap terjaga terhadap kualitas debitur pada sektor prioritas KLM. Pada Desember 2025 suku bunga kredit seluruh sektor prioritas KLM tercatat lebih rendah dibandingkan rata-rata industri (**Grafik 10**). Dalam kelompok sektor prioritas KLM sendiri, kelompok Pertanian, Industri Pengolahan, dan Hilirisasi mencatatkan suku bunga relatif lebih tinggi dibandingkan sektor KLM lainnya, yaitu sebesar 8,72%, dipengaruhi oleh kontribusi sektor Pertambangan dan Perdagangan. Sebaliknya, sektor jasa, termasuk ekonomi kreatif, mencatatkan rata-rata suku bunga yang lebih rendah, didukung oleh kontribusi sektor Pengangkutan dengan tingkat suku bunga yang lebih kompetitif. Di sisi lain, realisasi pembiayaan proyek prioritas Pemerintah turut mendorong penurunan suku bunga kredit pada sektor Konstruksi, *Real Estate*, dan Perumahan. Penurunan suku bunga kredit di sektor prioritas KLM juga didukung pengelolaan risiko kredit yang tetap terjaga, tecerminkan dari rasio NPL seluruh sektor prioritas yang berada di bawah 5% (**Grafik 11**). Kualitas kredit yang terjaga ini mencerminkan prospek risiko sektoral yang membaik dan mendukung keberlanjutan ekspansi pembiayaan. Sejalan dengan hal tersebut, segmen UMKM juga mencatatkan penurunan tingkat suku bunga kredit sebesar 5 bps secara bulanan menjadi 10,56%, serta perbaikan kualitas kredit dengan penurunan rasio NPL sebesar 17 bps menjadi 4,33% pada Desember 2025. Ke depan, kebijakan makroprudensial Bank Indonesia dalam memberikan insentif pada sektor prioritas KLM, termasuk UMKM diharapkan dapat mendukung akselerasi pembiayaan yang optimal.

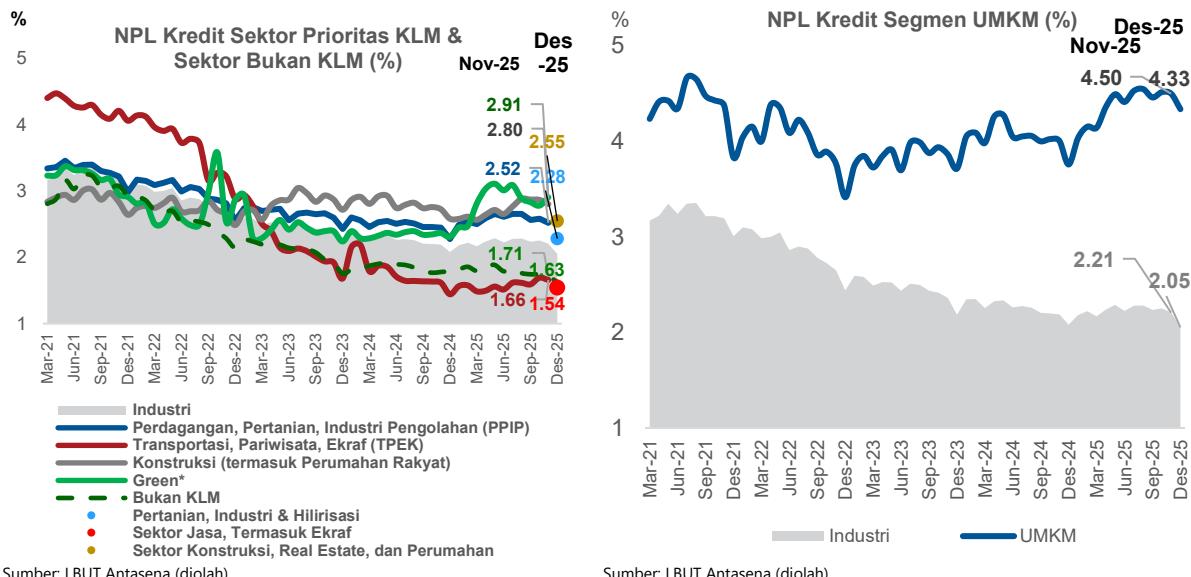
Grafik 1010. Perkembangan Suku Bunga Kredit Pada Sektor Prioritas KLM dan Segmen UMKM



Sumber: LBUT Antasena (diolah)

⁵ Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) merupakan insentif yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk mendorong intermediasi yang seimbang, berkualitas, dan berkelanjutan melalui pengurangan kewajiban giro bank di Bank Indonesia dalam rangka pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM) yang wajib dipenuhi secara rata-rata. Berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial. Sejak 1 Desember 2025, terdapat reklasifikasi sektor prioritas yang ditetapkan untuk memperkuat KLM antara lain: (1) sektor Pertanian, Industri & Hilirisasi; (2) sektor Jasa, termasuk Ekonomi Kreatif (Ekraf); (3) sektor Konstruksi, *Real Estate*, dan Perumahan. Selain sektor prioritas di atas, kebijakan KLM juga menyasar segmen UMKM dan Usaha Mikro (UMi).

Grafik 1111. NPL Kredit Sektor Prioritas KLM dan Segmen UMKM

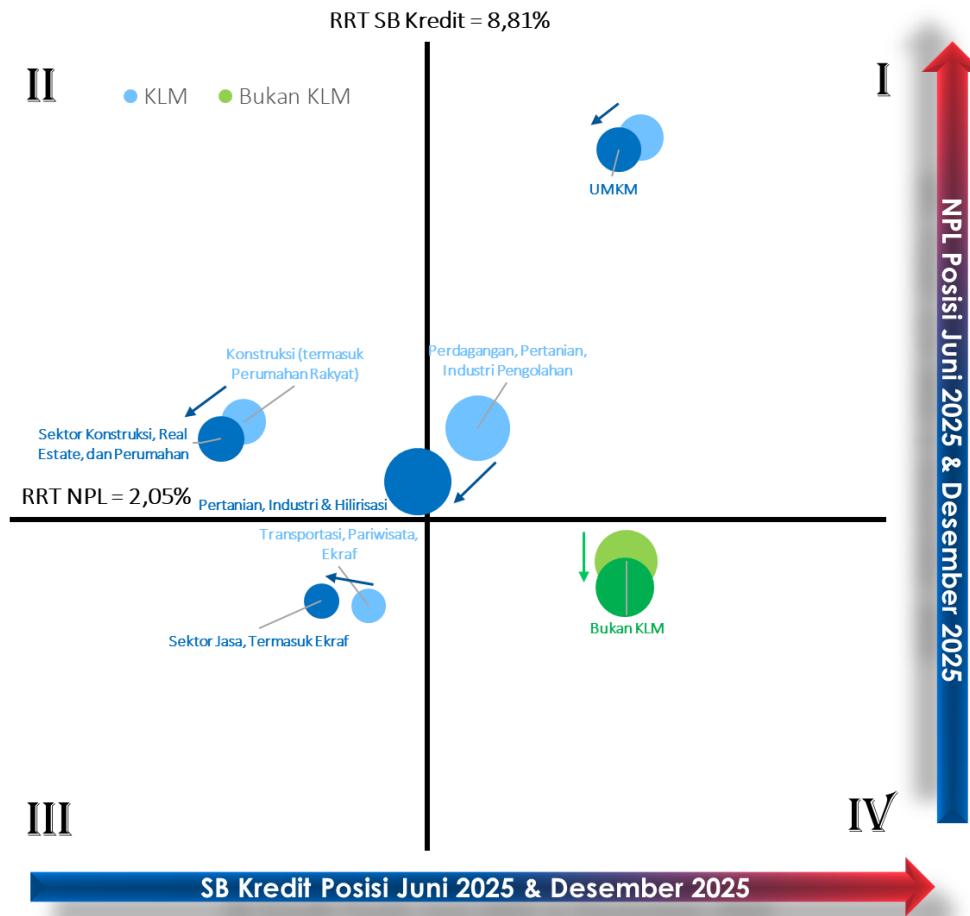


Sumber: LBUT Antasena (diolah)

Sumber: LBUT Antasena (diolah)

Dalam perspektif yang lebih panjang (enam bulan terakhir), suku bunga kredit pada seluruh sektor prioritas KLM tercatat mengalami penurunan. Perkembangan ini mendukung prospek permintaan kredit yang lebih baik dari sektor prioritas KLM sehingga menopang pertumbuhan kredit ke depan. Penurunan suku bunga kredit ini menempatkan sektor prioritas KLM pada kuadran II dan III (**Grafik 12**), sekaligus menjadikan suku bunga kredit sektor prioritas KLM lebih rendah dibandingkan rata-rata suku bunga industri. Kondisi ini mengindikasikan efektivitas kebijakan KLM dalam memperkuat transmisi penurunan suku bunga kebijakan secara terarah, sekaligus meningkatkan daya saing perbankan dalam menyalurkan kredit kepada dunia usaha dengan tetap menjaga kualitas kredit. Sementara itu, dinamika berbeda terjadi pada sektor non-KLM dimana suku bunga kredit cenderung tetap pada level 10,61%. Namun demikian, kualitas kredit pada sektor non-KLM juga mengalami perbaikan dengan NPL yang menurun sebesar 18 bps menjadi 2,05% (kuadran IV). Selain itu, segmen UMKM mencatatkan penurunan suku bunga kredit serta risiko kredit yang membaik, meskipun posisi UMKM masih berada pada kuadran I yang mencerminkan suku bunga dan risiko kredit yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa penyesuaian suku bunga pada segmen UMKM cenderung lebih bertahap dan berhati-hati, sejalan dengan karakteristik dan profil risiko yang relatif lebih tinggi dibandingkan sektor prioritas KLM lainnya.

Grafik 1212. Kuadran Pemetaan Suku Bunga dan NPL Sektor dan Segmen Prioritas KLM



Kuadran I: suku bunga tinggi, NPL tinggi

Kuadran II: suku bunga rendah, NPL tinggi

Kuadran III: suku bunga rendah, NPL rendah

Kuadran IV: suku bunga tinggi, NPL rendah

Tujuan dari transparansi asesmen SBDK adalah untuk memperkuat transmisi kebijakan moneter dan makroprudensial Bank Indonesia. Melalui transparansi, masyarakat dan dunia usaha dapat memperoleh informasi terkait perkembangan suku bunga dasar kredit perbankan dan suku bunga kredit yang ditawarkan oleh bank-bank. Transmisi suku bunga kebijakan yang lebih baik ke suku bunga kredit, dalam bentuk penetapan suku bunga kredit yang kompetitif dan efisien, diharapkan akan mampu menopang permintaan kredit sehingga membantu pemulihhan ekonomi.

Sebagai langkah awal, Bank Indonesia (BI) menyusun publikasi "Asesmen Transmisi Suku Bunga Kebijakan kepada Suku Bunga Dasar Kredit Perbankan." Terdapat berbagai faktor yang memengaruhi pembentukan suku bunga dasar kredit masing-masing bank yang bersifat spesifik untuk tiap bank, antara lain Harga Pokok Dana untuk Kredit, biaya *overhead*, dan margin keuntungan. Meskipun faktor-faktor tersebut cukup beragam, publikasi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada publik mengenai gambaran atas suku bunga dasar kredit perbankan Indonesia, termasuk informasi statistik distribusi suku bunga dasar kredit. Melalui publikasi asesmen ini, disamping mendorong transmisi kebijakan moneter agar lebih efektif, BI juga berupaya untuk memperluas diseminasi informasi kepada konsumen kredit baik korporasi maupun rumah tangga. Selain itu, publikasi ini bertujuan meningkatkan tata kelola, disiplin pasar, dan kompetisi dalam pembentukan suku bunga dasar kredit perbankan sehingga suku bunga dasar kredit yang ditawarkan dapat lebih kompetitif dalam mendorong permintaan kredit dan mempercepat pemulihan ekonomi.

Publikasi serupa merupakan sebuah praktik internasional yang sering dijumpai. Bank sentral negara lain seperti di Malaysia, India, dan Tiongkok juga meluncurkan kebijakan transparansi suku bunga kredit melalui publikasi *External Benchmark Rate*, *Loan Prime Rate*, dan *Base Rate*. IMF juga meminta tiap negara anggota untuk menyampaikan *Reference Lending Rate* dan *Reference Deposit Rate* untuk dipublikasikan sebagai selisih referensi suku bunga pinjaman terhadap suku bunga simpanan, yang merupakan salah satu *Financial Soundness Indicator* (FSI).